

**JAVAANSCH E P A D V I N D E R S O R G A N I S A T I E D I M A N G K U N E G A R A N
(1916-1942)**

Oleh:

Renny Pujiartati¹,

Hermanu Joebagio, Isawati²

ABTRACT

The aims of the research are to identify: (1) the background of the establishment of the Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) in Mangkunegaran; (2) the development of the JPO in Mangkunegaran (1916-1942); and (3) the role of the JPO, which has been done in the field of social, political, and cultural.

Research methodology that used is Historical method. The historical method is the process of critically examine and analyze records and relics of the past. The initial phase of the method of historical research is to collect data or heuristics. The research data were collected in the form of primary and secondary sources, consisting of archives, magazines, and books related to the JPO. The instrument used to collect the data in the form of a human instrument, in which the researcher herself. After the data collection was completed, a data analysis was conducted. In analyzing the data, the researcher verified or criticized, interpreted, and then explained the historiography.

Based on the research result, it can be concluded: (1) the establishment of JPO was caused by two factors: external and internal factors. External factors derived from the development of the world scouting movement towards the establishment of the JPO and internal factors derived from the socio-political conditions faced by Mangkunegoro VII at the beginning of his reign; (2) the development of the JPO is divided into three periods. In 1916-1923 was an early period, so that the JPO was difficult in recruiting members. In 1924-1938 was a JPO progression period, in 1937 the JPO already has 28 branches with 6,000 members. In 1929-1942 was a period of the decline of JPO then dissolved by the Japanese in 1942; (3) the JPO has an important role in the social, political, and cultural. The role of JPO in the social field is as a container and an instrument in preparing physically and mentally of the members to face the

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS.

² Dosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS.

social life of its members in the future. Politics, JPO performs political activities to show that Mangkunegoro VII has the power, authority, influence and great power in politics. JPO's role in the field of culture and arts education. JPO is used as containers to educate and lead children, especially in terms of the formation of personality and body work in order to be useful and valuable population. In the arts, JPO actively teaches Javanese art especially palace Mangkunegaran to its members and to the subjects Mangkunegaran in general.

Keywords: *Javaansche Padvinders Organisatie, JPO, Mangkunegaran Scouting.*

PENDAHULUAN

Kepanduan atau yang sekarang ini dikenal dengan pramuka merupakan wadah kegiatan pemuda yang telah ada di Indonesia sejak awal abad ke-20 (Utomo, 1995). Kelahiran dan perkembangan gerakan kepanduan pribumi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan masyarakat Indonesia pada masa kolonial yang serba terbelakang dan mengalami diskriminasi di segala bidang. Namun demikian sistem kolonial dengan segala macam bentuk politiknya, terutama sejak dilaksanakan politik etis pada awal abad ke-20 telah menimbulkan proses modernisasi di berbagai bidang seperti transmigrasi, irigasi, edukasi dan lain sebagainya. Kartodirdjo, Poesponegoro, dan Notosusanto menyebutkan bahwa politik etis mengubah pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan Indonesia tidak lagi sebagai daerah yang menguntungkan, tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi keperluannya dan ditingkatkan budaya rakyat pribuminya (1975).

Gerakan kepanduan atau yang dikenal dengan *scouting* bermula di Inggris pada tahun 1907 yang diprakasai oleh Lord Baden Powell. Pada tahun 1908, Baden Powell menulis buku *Scouting for Boys*. Buku ini kemudian menyebar di seluruh daratan Eropa sampai ke daerah-daerah jajahan dan mengakibatkan perkembangan kepanduan semakin besar.

Kepanduan di Indonesia pertama kali lahir di Jakarta pada tahun 1912 dengan nama *Nederlance Padvinders Organisatie* disingkat NPO. Organisasi ini didirikan oleh John Smith atas anjuran perkumpulan pandu di negeri Belanda (Utomo, 1995). Dalam waktu singkat berdiri beberapa organisasi *padvinders* bangsa Belanda di Indonesia, yang akhirnya pada tanggal 4 September 1914 dipersatukan dalam NIPV (*Nederlands Indische Padvinders Vereeniging*). NIPV mempunyai janji dan undang-undang persis seperti kepanduan Belanda, yang berbunyi *Trouw aan de Koningin*, artinya setia pada Ratu Belanda. Janji tersebut lambat laun dirasakan oleh pemuda Indonesia sebagai duri dalam daging bagi bangsa Indonesia (Sumarmo, Reksodipuro, dan Soebagio, 2006). Para pemuda mulai muncul rasa nasionalismenya ingin mendirikan organisasi kepanduan pribumi yang mempunyai janji setia pada Tanah Air dan Bangsa.

Organisasi kepanduan pribumi yang pertama kali didirikan adalah *Javaansche Padvinders Organisatie* atau yang disingkat dengan JPO pada bulan September 1916 di ibukota Mangkunegaran atau Solo. Berdirinya organisasi kepanduan di Mangkunegaran, tidak terlepas dari peranan Mangkunegoro VII sebagai seorang bangsawan Jawa yang menjadi aktivis Budi Utomo. Kelahiran JPO lalu diikuti oleh lahirnya organisasi-organisasi kepanduan pribumi lainnya, Semedi (2011) menyatakan:

One afternoon on his way back from lecturing, Ahmad Dahlan, the founder of the Muhammadiyah Movement, happened to be among the bystanders. He was deeply impressed by what he saw and decided to bring scouting to his organisation. Ahmad Dahlan was not the only one, leaders of Boedi Oetomo, the first nationalistic political movement, were also impressed by the Mangkunegaran scouts (hlm. 23).

Organisasi-organisasi kepanduan pribumi lainnya yang didirikan yaitu *Hizbul Wathan*, yang didirikan oleh Muhammadiyah dan *Nationale Padvinderij* milik Budi Utomo. *Jong Java Padvinderi* (JJP) yang didirikan oleh *Jong Java*. Di Kasunanan Surakarta didirikan organisasi kepanduan Teruna Kembang yang dipimpin oleh Pangeran Surjosubroto. Pada tahun 1923 juga berdiri *Nationale Padvinders Organisatie* (NPO) milik Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Usman. *Jong Sumatranen Bond* mendirikan Pandu Pemuda Sumatera, sedangkan Sarekat Islam mendirikan Wira Tamtama dengan pemimpinya A. Zarkasih.

Pada umumnya setiap organisasi kepanduan mempunyai coraknya sendiri dalam hal faktor-faktor yang melatarbelakangi kelahirannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, perkembangannya serta peranan-peranan yang telah dilakukannya. JPO merupakan organisasi kepanduan yang pertama kali didirikan oleh pribumi pada tahun 1916. Organisasi ini didirikan atas prakasa Mangkunegoro VII. Kelahiran JPO ini, kemudian memelopori lahirnya organisasi-organisasi kepanduan pribumi lainnya. Pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia, membubarkan semua organisasi pergerakan nasional dan semua organisasi pribumi, maka JPO dan semua organisasi pemuda juga dibubarkan (Citrosoma, 1944).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian merekonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa literatur, seperti perpustakaan dan arsip. Metode sejarah mempunyai beberapa langkah, yaitu : (1) heuristik, yakni menghimpun jejak-jejak masa lampau, (2) kritik, yakni menyelidiki jejak-jejak masa lampau baik bentuk maupun isinya, (3) interpretasi, yakni menetapkan makna saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, (4) historiografi, yakni menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk

tulisan maupun kisah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer(1) Majalah Kepandoean yang diterbitkan oleh pengurus *Javaansche Padvinders Organisatie* Mangkunegaran; (2) Majalah Soerya No. 8 tahun 1939; (3) Majalah Pemimpin *JPO* No. 2 tahun 1938; (4) *Gegaran Minangka Tjepenganipoen Padvinders* (1920), dalam Bundel Masalah *JPO* Mangkunegaran dan Krida Muda ; (5) *Statuten Javaansche Padvinders-Organisatie (JPO)* di Mangkunegaran Surakarta dalam Bundel Masalah *JPO* Mangkunegaran dan Krida Muda. Sumber sekunder yaitu berupa buku, internet, dan jurnal yang relevan dengan judul penelitian.

Sumber data yang digunakan baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini adalah data tertulis sehingga teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data atau materi yang terdapat di dalam buku, majalah, dokumen dan surat kabar. Pengumpulan data dilakukan dengan Membaca dan mencatat sumber primer yang membahas tentang kepanduan secara umum dan khususnya tentang *Javaansche Padvinders Organisatie* di Mangkunegaran baik dari majalah, arsip maupun buku-buku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Berdirinya *Javaansche Padvinders Organisatie* di Mangkunegaran.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berdirinya *JPO* dapat dilihat dari perkembangan gerakan kepanduan menjelang berdirinya *JPO*. Gerakan kepanduan pertama kali lahir di Inggris pada tahun 1907 yang diprakarsai oleh Baden Powell (Sunardi, 2013). Sesudah Baden Powell mendirikan kepanduan, sistem pendidikan kepanduan kemudian menyebar ke beberapa negara termasuk ke *Neederland* dan kemudian dibawa oleh orang-orang Belanda ke negara jajahannya, Indonesia. Organisasi kepanduan pertama kali

lahir di Jakarta pada tahun 1912 dengan nama *Nederlansche Padvinders Organisatie* yang disingkat dengan NPO. NPO didirikan oleh John Smith atas anjuran perkumpulan pandu di negeri Belanda, sehingga kelahiran kependuan di Indonesia semula bersifat *Neerlandosentris* (Utomo, 1995). Pada tanggal 4 September 1914 perkumpulan-perkumpulan kependuan kemudian dipersatukan dalam satu wadah dengan nama *Neederlands Indische Padvinders Vereeniging* (NIPV). NIPV merupakan satu-satunya organisasi kependuan yang diakui oleh pemerintah *De Neederland Indische Regering* sebagai organisasi kependuan di *Neederlandsch Indie* (Sumarmo dkk, 2006).

Gerakan kependuan semakin populer di Indonesia, setelah berdirinya NIPV. Selain NIPV di Indonesia juga terdapat organisasi kependuan lain yang anggotanya masih terbatas untuk kalangan tertentu saja, misalnya di sekolah-sekolah Eropa (Pringgodigdo, 1994). Selain sifatnya yang eksklusif NIPV mempunyai janji dan undang-undang persis seperti kependuan Belanda. Janji NIPV terdapat kata-kata *trouw aan de koningin* yang artinya setia kepada Ratu Belanda. Janji tersebut lambat laun dirasakan sebagai duri dalam daging oleh pemuda-pemuda yang mulai bergejolak rasa kebangsaannya, akibatnya banyak organisasi-organisasi kependuan yang melepaskan diri dari NIPV. Kata-kata janji setia kepada Ratu Belanda kemudian diganti dengan *trouw aan mijn Land en Volk* yang artinya setia pada Tanah Air dan Bangsa (Sumarmo dkk, 1974).

Bangsa Indonesia melihat kependuan bisa dijadikan alat untuk meningkatkan budi luhur, keterampilan dan kepribadian serta memupuk bakat kepemimpinan. Semua hal itu berguna untuk menumbuhkan rasa kebangsaan di kalangan pemuda (Utomo, 1995). Sebagai reaksi atas perkembangan kependuan di Indonesia, kemudian ada usaha-usaha dari penduduk bumi putera untuk

mendirikan organisasi kepanduannya sendiri. Pada bulan September tahun 1916, sebuah organisasi kepanduan bumi putera untuk pertama kalinya telah berdiri yakni JPO milik swapraja Mangkunegaran. Pringgodigdo menyebutkan berdirinya organisasi kepanduan di Solo tidak terlepas dari peranan Mangkunegoro VII sebagai bangsawan Jawa yang menjadi aktivis Boedi Oetomo (1994). Tujuan Mangkunegoro VII mendirikan JPO adalah sebagai wadah generasi muda yang bertujuan untuk melibatkan dan mempersiapkan mereka ikut serta dalam arus pergerakan bangsa menuju kepada kemerdekaan Indonesia (Widada, 2008).

2. Faktor Internal

a. Keadaan Sosial Politik

Sejak berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830, kekuasaan, wewenang, pengaruh, wibawa, dan hak-hak istimewa raja-raja di daerah *Vorstenlanden* semakin dibatasi dan dikurangi. Pengawasan terhadap daerah *Vorstenlanden* juga semakin diperketat (Suhartono, 1991). Pelaksanaan politik etis dan reorganisasi di *Vorstenlanden* yang di mulai sejak awal abad ke-20, juga masih menunjukkan campur tangan langsung dan berlebihan dari beberapa pegawai pemerintah kolonial Belanda (Larson, 1990). Tindakan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial membuat raja-raja di daerah *Vorstenlanden* sakit hati dan tidak leluasa dalam menjalankan pemerintahan di kerajaannya. Hal ini juga dirasakan oleh Mangkunegoro VII, apalagi setelah dinobatkan sebagai raja di swapraja Mangkunegaran, Mangkunegoro VII harus melepaskan segala jabatannya dalam kepengurusan Budi Utomo. Pemerintah kolonial Belanda terus berusaha untuk membatasi dan mengawasi serta selalu mencurigasi segala sikap, tindakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan kebangsaan (Larson, 1990).

Dilihat dari kondisi sosial politik yang terjadi di swapraja Mangkunegaran pada masa awal pemerintahan Mangkunegoro VII, maka tampaknya tujuan utama Mangkunegoro VII mendirikan JPO adalah untuk tujuan politis. JPO digunakan untuk menunjukkan dan menegaskan nasionalisme, kepemimpinan, kekuasaan, pengaruh, kepeloporan dan eksistensi swapraja Mangkunegaran di hadapan pemerintah kolonial Belanda dan raja-raja Jawa lainnya terutama Susuhan Paku Buwana X. Berdirinya JPO di swapraja Mangkunegaran telah menunjukkan kepeloporan dan kepemimpinan Mangkunegoro VII sebagai raja Jawa yang pertama kali berhasil mendirikan organisasi kepanduan pribumi. Keberhasilan Mangkunegoro VII dalam mendirikan organisasi kepanduan kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh kebangsaan lainnya, Kasunanan Surakarta juga nampaknya tidak mau ketinggalan dengan mendirikan organisasi kepanduan yang diberi nama Teruna Kembang yang dipimpin oleh Pangeran Surjosubroto (Utomo, 1995).

b. Keadaan Sosial Budaya

Kawula swapraja Mangkunegaran terdiri dari kawula raja yaitu masyarakat pribumi dan kawula asing yang terdiri Timur Asing, Eropa, dan Indo, sehingga kawula swapraja Mangkunegaran merupakan masyarakat yang majemuk. Di daerah-daerah kejawen di *Vorstenlanden* seperti swapraja Mangkunegaran, orang Jawa merupakan kelompok sosial mayoritas (Pringgokusumo, 1987). Orang Jawa inilah yang merupakan kawula raja, sebagai pendukung utama dari sistem politik yang berbentuk kerajaan Jawa, sesuai dengan budaya dan sistem nilai tradisional Jawa yang dimiliki dan dianut.

Menjelang berdirinya JPO, pendidikan bagi masyarakat pribumi di swapraja Mangkunegaran paling lambat

perkembangannya apabila dibandingkan dengan perkembangan pendidikan di daerah *Vorstenlanden* lainnya (Singgih, 1944). Mangkunegoro VII sebagai raja yang modern dan berpendidikan Barat berpandangan bahwa keberadaan JPO akan sangat bermanfaat untuk kawula Mangkunegaran. Pembentukan JPO merupakan salah satu cara untuk memajukan kehidupan sosial, khususnya pendidikan di luar keluarga dan sekolah atau pendidikan nonformal, kawula Mangkunegaran sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Yosowidagdo, 1987).

B. Perkembangan *Javaansche Padvinders Organisatie* di Mangkunegaran

1. Periode Tahun 1916-1923

Pada awal berdirinya, JPO sulit untuk merekrut anggota. Hal ini terjadi karena kegiatan kepanduan belum begitu populer di kalangan masyarakat Mangkunegaran. Organisasi kepanduan dan kegiatan-kegiatan kepanduan masih merupakan suatu bentuk pengaruh budaya Barat yang baru dan masih sulit untuk dipahami. Di samping itu masyarakat pribumi swapraja Mangkunegaran masih beranggapan bahwa JPO merupakan organisasi elit dan eksklusif yang keanggotaannya hanya khusus bagi lapisan atas masyarakat pribumi di swapraja Mangkunegaran.

JPO juga mengalami kendala-kendala lainnya seperti kecakapan dan pengetahuan para pemimpin JPO di bidang kepanduan masih sangat minim. Jumlah *leiders* JPO juga masih sangat sedikit, sedangkan para pengurus pada umumnya tidak memiliki kecakapan sebagai *leiders*. Apabila *leiders* di suatu daerah pindah, maka kelompok pandu daerah yang ditinggal tersebut menjadi bubar. Perbaikan-perbaikan oleh pengurus terus dilakukan untuk memajukan JPO, hasilnya pada tahun 1923 jumlah cabang

JPO bertambah menjadi lima cabang yaitu Solo serta beberapa kota kawedanan di Kabupaten Kota Mangkunegaran, yang meliputi Tasikmadu, Colomadu, Baturetno, dan Karanganyar.

2. Periode Tahun 1924-1938

Pada periode ini JPO sudah bisa menangani kendala-kendala yang dihadapi pada periode sebelumnya. Pada tahun 1931 jumlah cabang JPO bertambah, JPO telah memiliki 6 cabang yaitu Solo, Wonogiri, Baturetna, Karanganyar, Tasikmadu dan Colomadu. Setiap cabang memiliki pengurusnya sendiri. Pengurus ini terdiri dari pengurus yang menjalankan organisasi dan komisariss teknis yang mengurus kepanduan (Wasino, 2008). Kemajuan JPO juga dapat dilihat dari bertambahnya cabang. Pada tahun 1934 JPO mempunyai 10 cabang terdiri dari Solo, Wonogiri, Batoeretno, Karanganyar, Tasikmadu, Colomadu, Jatisrono, Slogohimo, Karangpandan dan Ngoentoronadi. Sementara daerah-daerah Kebakkramat, Ngargojoso, Wuryantoro, Ngadirjo, Ngargoyoso dan Pratimantoro baru berencana akan bergabung menjadi cabang JPO. Akhir tahun 1935, JPO mempunyai 2.378 anggota dan pengurus. Pengurus JPO mengusahakan beberapa cara untuk kemajuan JPO yaitu dengan mengusahakan dana dan mengatur administrasi. Pengurus JPO selalu mengadakan kursus-kursus untuk para *leider* agar kemampuan *leider* meningkat (Kepandoean No.3, 1936). JPO semakin maju dan berkembang, pada tahun 1937 mempunyai 28 cabang dan jumlah anggotanya mencapai 6000 orang (Citrosoma, 1994).

JPO aktif menjalin hubungan dengan organisasi kepanduan lainnya seperti *Jong Java Padvinderij* dengan mengadakan kongres-kongres yang dilaksanakan di Solo pada tahun 1926, 1927, 1928, dan 1929. Kongres tersebut juga diikuti oleh Pandu Indonesia (*Programma van het Jong Java Padvinderscongres*, 1928). Pada tahun 1926 JPO menghadiri

pertemuan di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh NIPV. Pertemuan ini dihadiri oleh *Hizbul Wathon*, *Nationale Padvinderij*, *Indonesische Nationale Padvinders* dan *Nationale Padvinders Organisatie* yang kemudian menolak untuk bergabung dengan NIPV (Semedi, 2011).

Pada bulan Juni tahun 1937 JPO mengikuti *jambore padvinder* yang diadakan di Belanda dengan mengirimkan perwakilan sebanyak 6 orang (Majalah Soerya No. 8, 1939). Ikut sertanya JPO dalam jambore dunia, telah membuktikan bahwa JPO tidak hanya eksis di lingkungan swapraja Mangkunegaran saja, tetapi juga dikenal di kalangan internasional.

3. Periode Tahun 1939-1942

Periode 1939 sampai 1942 merupakan periode kemunduran JPO. Salah satu faktor penyebab kemunduran JPO adalah keputusan JPO yang bergabung dengan NIPV. Banyak anggota JPO yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, kemudian keluar dari JPO. Faktor lainnya adalah masalah internal yang terjadi antara JPO dan Krida Muda. Kedua organisasi ini terus bersaing dalam hal memenangkan pengaruhnya di kawula swapraja Mangkunegaran.

Pada awal tahun 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 1942 Kolonel Nakayama (kepala bagian umum dari pemerintahan pendudukan militer Jepang sementara) selaku sebagai wakil dari Mayor Jenderal Harada (Kepala pemerintahan pendudukan militer Jepang di Batavia) mengunjungi istana Mangkunegaran. Kunjungan Kolonel Nakayama sekaligus sebagai pemberitahuan resmi bahwa sejak saat itu Mangkunegaran langsung di bawah kekuasaan pemerintah pendudukan militer Jepang yang pusatnya di Batavia (Pringgokusumo, 1989). Pemerintah pendudukan militer Jepang kemudian membubarkan semua organisasi pergerakan nasional dan semua perkumpulan

pribumi, maka JPO dan semua organisasi pemuda dan pribumi di Mangkunegaran juga dibubarkan. Atas perintah pemerintahan militer Jepang, pada tahun 1943 Mangkunegoro VII mendirikan Barisan Gyo Tai dan juga Jawa Renggo Seinendan untuk menggantikan organisasi-organisasi pemuda milik swapraja Mangkunegaran (Citorsoma, 1994).

C. Peranan *Javaansche Padvinders Organisatie* Di Mangkunegaran (1916-1942)

1. Bidang Sosial

JPO sebagai organisasi kepanduan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Mangkunegaran melakukan beberapa fungsi dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi anggotanya dan juga kawula Mangkunegaran. JPO berperan sebagai wadah dan sarana bagi kawula Mangkunegaran yang menjadi anggotanya dalam mempersiapkan jasmani dan rohani mereka untuk menghadapi kehidupan sosial di masa mendatang yang semakin kompleks dan modern sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Kepandoen No. 2, 1936).

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh JPO merupakan salah satu bentuk propaganda yang terdapat dalam janji-janji pandu dan juga anggaran dasar JPO. Dalam anggaran dasar JPO disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuannya, JPO menerapkan beberapa langkah, salah satunya adalah menanamkan rasa tanggung jawab, cinta kepada sesama dan juga suka menolong (*Statuten Javaansche Padvinders Organisatie*, 1932). Langkah-langkah tersebut juga selaras dengan janji-janji pandu yang harus ditepati oleh para anggota JPO. Janji-janji pandu tersebut diantaranya adalah bahwa pandu

harus siap untuk berkorban, cinta bekerja dan tidak mengecewakan (Kepandoean No. 1, 1936).

JPO sering membantu masyarakat umum seperti membangun masjid, sekolah, jembatan, panti asuhan dan lain sebagainya. Pada tahun 1936 JPO membentuk *Troep Bahoe Sasra* atau Tentara Sambatan, yaitu suatu pasukan yang beranggotakan para pandu, *leiders* dan *leidsters* yang bertugas membantu masyarakat swapraja Mangkunegaran dalam hal kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan (Kepandoean No. 9, 1936). Pada tahun 1937 JPO juga membentuk suatu badan penolong kematian bernama *Tresno Soedoro* atau T. S. JPO dan badan ini juga beranggotakan para pandu, *leiders* dan *leidsters* (Kepandoean No. 5 dan 6, 1938). Beberapa contoh kegiatan sosial JPO diatas telah menunjukkan bahwa selama kepengurusannya JPO melakukan peranan dalam bidang sosial.

2. Bidang Politik

Anggaran dasar JPO menyebutkan bahwa JPO tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau politik. Namun dalam perkembangannya JPO melakukan kegiatan-kegiatan politik atas perintah Mangkunegoro VII sebagai pelindung JPO. JPO melakukan kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan bersama dengan organisasi-organisasi pemuda di Mangkunegaran seperti *Legiun Mangkunegaran* dan *Pekempalan Kawoela Mangkoe Negaran* yang disingkat dengan PKMN dan organisasi-organisasi kepanduan pribumi lainnya. Kegiatan-kegiatan di bidang politik bertujuan untuk membuktikan kepada pihak luar bahwa swapraja Mangkunegaran mempunyai kekuatan fisik yang besar, terorganisasi dengan baik dan modern, serta dapat diandalkan sebagai tenaga sukarela dalam melaksanakan berbagai kepentingan dan tujuan tertentu dari Mangkunegoro VII dan juga pemerintah swapraja Mangkunegaran. Kegiatan-kegiatan di bidang

politik berfungsi untuk menunjukkan bahwa Mangkunegoro VII memiliki kekuasaan, wibawa, pengaruh dan kekuatan yang besar di bidang politik. Pihak luar yang dimaksud adalah pemerintah kolonial Belanda dan swapraja Kasunanan, khususnya kepada raja-raja dari swapraja Kasunanan.

Sejak awal berdirinya JPO selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan upacara dan perayaan istana Mangkunegaran bersama-sama dengan *Legiun* Mangkunegaran dan organisasi-organisasi pemuda Mangkunegaran lainnya yang memperoleh subsidi dari pemerintahan swapraja Mangkunegaran. Organisasi-organisasi ini mempunyai tugas untuk memeriahkan berbagai macam upacara dan perayaan keraton dengan cara menampilkan berbagai atraksi yang menarik. Kegiatan ini secara politis dimaksudkan untuk membuktikan kepada pihak luar akan kesetiaan dan kepatuhan kawula mangkunegaran, termasuk di dalamnya golongan terpelajar, kepada Mangkunegoro VII.

Kerjasama dilakukan antara JPO dan organisasi-organisasi kependuan pribumi lainnya. Kegiatan kerjasama ini bersifat kependuan dan nonkependuan. Kegiatan nonkependuan yang dilakukan oleh JPO dan organisasi-organisasi pribumi lainnya adalah dengan cara menghalangi dan menentang segala usaha NIPV yang ingin menggabungkan organisasi-organisasi kependuan pribumi dengan NIPV. Organisasi-organisasi kependuan pribumi tidak mau menggabungkan diri dengan NIPV, karena apabila menggabungkan diri dengan NIPV harus setia, patuh dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Usaha tidak mau bergabung dengan NIPV menandakan bahwa organisasi-organisasi kependuan pribumi khususnya JPO tidak mau dikendalikan oleh kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi-organisasi kependuan pribumi sering mengadakan kongres. Di dalam kongres tersebut dibahas langkah-langkah politik

yang akan mereka tempuh untuk menghadapi NIPV dan juga pemerintah kolonial Belanda. Adapun kongres-kongres yang diikuti oleh JPO adalah kongres *Jong Java Padvinderij* di Solo pada tahun 1926, 1927, 1928, dan 1929. Kongres tersebut juga diikuti oleh kepanduan pribumi lainnya seperti Pandu Indonesia (*Programma van het Jong Java Padvinderscongres*, 1928). Pada tahun 1926 JPO menghadiri pertemuan di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh NIPV. Pertemuan ini dihadiri oleh *Hizbul Wathon*, *Nationale Padvinderij*, *Indonesische Nationale Padvinders* dan *Nationale Padvinders Organisatie* yang kemudian menolak untuk bergabung dengan NIPV (Semedi, 2011).

Pada tanggal 5 Juni 1932 di Surakarta berdiri suatu organisasi politik yang bernama Perkumpulan Kawula Surakarta yang disingkat dengan PKS di bawah pimpinan Mr. Singgih (Larson, 1990). PKS yang didukung oleh swapraja Mangkunegaran berusaha untuk meluaskan pengaruhnya di wilayah pedesaan swapraja Mangkunegaran. Untuk mengantisipasi pengaruh PKS di wilayah Swapraja Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendirikan organisasi politik tandingan di wilayah pedesaan dengan nama PKMN. JPO ditugaskan oleh Mangkunegoro VII untuk membantu kegiatan-kegiatan PKMN. Pada tanggal 11 November 1934 PKMN mendirikan organisasi pemuda yang bernama Krida Muda . Sejak tahun 1934 Mangkunegoro VII dan pemerintah swapraja Mangkunegaran memerintahkan JPO, Krida Muda dan PKMN untuk membendung pengaruh PKS. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas *Legiun* Mangkunegaran yang merupakan kekuatan fisik dan kebanggaan swapraja Mangkunegaran, Mangkunegoro VII dan pemerintah swapraja Mangkunegaran merekrut anggota organisasi-organisasi pemuda Mangkunegaran untuk menjadi anggota *Legiun* Mangkunegaran (Kepandoen No. 4, 1936; Pringgodigdo, 1994).

3. Bidang Budaya

1) Bidang Pendidikan

Perhatian Mangkunegoro VII dalam bidang pendidikan sangat besar sekali, tidak terbatas pada rakyat di swapraja Mangkunegaran saja melainkan juga bagi rakyat atau penduduk Indonesia pada umumnya (Citrosoma, 1994). Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan Mangkunegoro VII dalam bidang pendidikan seperti mendirikan sekolah yang diberi nama Siswo, membuat panitia istimewa untuk memberantas buta huruf di swapraja Mangkunegaran, mendirikan beberapa organisasi-organisasi kepemudaan seperti Krida Muda, dan JPO. Mangkunegara sangat memperhatikan sekali pendidikan rohani dan pendidikan jasmani untuk para rakyatnya.

Majalah Kepandoen volume 1 tahun 1936 menyebutkan bahwa JPO sebagai tempat pendidikan, dimana kependuan memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Para anak-anak muda ini diharapkan mempunyai badan yang sehat, mempunyai pengetahuan yang cakap serta mempunyai karakter. Tujuan utama JPO tercantum dalam anggaran dasarnya adalah untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak terutama dalam hal pembentukan kepribadian dan olah tubuh agar menjadi penduduk yang berguna dan berharga (Wasino, 2008).

Undang-undang Pandu JPO yang berisi 13 pasal, merupakan janji yang harus ditepati oleh para anggota JPO. Undang-undang ini merupakan pedoman utama dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh JPO. Janji-janji tersebut adalah pedoman tingkah laku yang harus dijalankan oleh para anggota JPO. Dengan menjalankan pedoman utama yang ada di dalam undang-undang pandu diharapkan para anggota JPO mempunyai sikap hidup yang positif. Sikap hidup positif yang

dimaksud di sini adalah seorang pandu diharapkan untuk selalu percaya diri, mempunyai jiwa ksatria, cepat dalam mengambil keputusan, dapat dipercaya, sederhana dan juga bersahaja, cinta terhadap tanah airnya dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa para anggota JPO telah dibimbing untuk memiliki kepedulian sosial yang besar, memiliki budi pekerti yang luhur, sikap hidup yang baik, bahkan pendidikan politik dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Kegiatan-kegiatan JPO pada dasarnya adalah pendidikan yang sifatnya untuk membangun karakter para anggotanya.

2) Bidang Kesenian

Javaansche Padvinders Organisatie mengajarkan kesenian Jawa khas istana Mangkunegaran kepada para anggotanya dan kepada kawula Mangkunegaran pada umumnya, khususnya di wilayah pedesaan swapraja Mangkunegaran (Kepandoean No. 10, 1936). JPO mengajarkan tembang-tembang macapat kepada para anggotanya. Pada dasarnya lagu-lagu macapat yang diajarkan mengandung nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pandu.

Selain kesenian Jawa khas Mangkunegaran, JPO juga memperkenalkan dan mempopulerkan kesenian Barat kepada para anggotanya. Kesenian Barat tersebut, misalnya seni musik dengan peralatan musik yang modern, drama modern, dan lain sebagainya. JPO menekankan agar para anggota dididik dalam hal musik baik musik Jawa maupun musik yang lainnya agar menumbuhkan rasa kehalusan dan juga penggirang hati saat JPO mengadakan kegiatan-kegiatan seperti training, *kamperenz*, jelajah medan dan lain sebagainya.

JPO juga mengajarkan kepada anggotanya untuk mencintai budaya seperti membatik. Majalah Kepandoean No 3&4 menyebutkan bahwa seorang pandu diharapkan bisa

membatik, terutama untuk pandu puteri. Membatik mempunyai kelebihan tersendiri karena dengan membatik seseorang diajarkan untuk selalu konsentrasi. Membatik juga mengajarkan sikap sabar dan teliti (1938). Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh JPO dalam rangka mengenalkan kesenian kepada anggotanya menunjukkan bahwa JPO juga memiliki peranan dalam bidang kesenian.

KESIMPULAN

Javaansche Padvinders Organisatie merupakan organisasi kepanduan pribumi yang pertama kali didirikan. Berdirinya JPO tidak terlepas dari peranan Mangkunegoro VII sebagai raja Swapraja Mangkunegaran yang juga sebagai aktivis Budi Utomo. Latar belakang berdirinya JPO dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga internal. Faktor eksternal berasal dari perkembangan kepanduan dunia yang didirikan oleh Baden Powell di Inggris, sedangkan faktor internal berasal dari kondisi Swapraja Mangkunegaran yang meliputi kondisi sosial politik dan sosial budaya. Perkembangan JPO dibagi menjadi 3 periode. Periode 1916-1923 merupakan periode awal, sehingga JPO masih kesulitan dalam merekrut anggota. Periode 1924-1938 merupakan masa kemajuan JPO, pada tahun 1937 JPO sudah memiliki 28 cabang dengan anggotanya berjumlah 6.000 orang. Periode 1929-1942 merupakan masa kemunduran JPO yang kemudian dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1942. Peran JPO dalam bidang sosial yaitu sebagai wadah dan sarana dalam mempersiapkan jasmani dan rohani anggotanya untuk menghadapi kehidupan sosial di masa yang akan datang. Bidang politik, JPO melakukan kegiatan-kegiatan politik untuk menunjukkan bahwa Mangkunegoro VII memiliki kekuasaan, wibawa, pengaruh dan kekuatan yang besar di bidang politik. Peran JPO dalam bidang budaya yaitu pendidikan dan kesenian. JPO dijadikan wadah untuk mendidik dan

mengarahkan anak-anak terutama dalam hal pembentukan kepribadian dan olah tubuh agar menjadi penduduk yang berguna dan berharga. Di bidang kesenian, JPO aktif mengajarkan kesenian Jawa khas istana Mangkunegaran kepada para anggotanya dan kepada kawula Mangkunegaran pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Citrosoma, A. S. (1994). *Oesaha dan Djasa Sri Mangkunegoro VII Terhadap Pendidikan dan Pengajaran*. Artikel tidak diterbitkan, No. 416 Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran.
- Kartodirdjo, S., Poesponegoro, M.J., & Notosusanto, N. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Larson, Goerge D. (1990). *Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*. Terj. Lopian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pringgodigdo, A. K. (1994). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Pringgokusumo, Husodo. (1989). *Kedudukan Pangeran Mangkunegoro dalam Struktur Politik yang Terpecah Belah di Jawa Tengah*. Surakarta: Artikel tidak diterbitkan, No. 1424 Perpustakaan Reksa Pustoko Mangkunegaran.
- Semedi, Pujo. (2011). Padvinders, Pandu, Pramuka: Youth and State in the 20th Century Indonesia (Versi elektronik). *Afrika Development*, 36 (3 & 4), 19 – 38. Diperoleh 01 Maret 2014, dari <http://www.ajol.info/index.php/ad/article/view/74113/64773>.
- Singgih, R. P. (1986). *Partini: Tulisan Kehidupan Seorang Putri Mangkunegaran*. Terj. Margareth M. Alibasah. Jakarta: PT. Djambatan.

Suhartono. (1991). *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Padesaan Surakarta (1830-1920)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Sumarmo, dkk. (1974). *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung- Gedung Bersejarah Surakarta.

Sunardi, Andri Bob. (2013). *Boyman: Ragam Latih Pramuka*. Bandung: Nusa Muda.

Utomo, C. B. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Widada. (2008). *Mengenang B. R. M Soerya Soeparto: Bergerak dan Melangkah Maju untuk Bangsaanya*. Surakarta: Yayasan Mangadeg.

Wasino. (2008). *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKiS.

Yosowidagdo, Raden Ngabei. (1987). *Bocah Mangkunegaran*. Terj. Tidak diterbitkan oleh Srikayati, No. 871 Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran.

Manuskrip

Programma van het Jong-Java Padvinderscongres Gehouden te Solo den 24-28 Juni 1928, No. 61 Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran.

Statuten Javaansche Padvinders Organisatie (JPO), dalam *Bundel Masalah JPO Mangkunegaran dan Krida Muda*, No. P 180 Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran.

Majalah

Kepandoean, No. 1, Tahun I, Januari 1936.

Kepandoean, No. 2, Tahun I, Februari 1936

Kepandoean, No. 4, Tahun I, Maret 1936.